

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Dana Desa Belum Cair, Terancam Dikembalikan
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.2
Edisi	: Sabtu, 19 Mei 2018

Dana Desa Belum Cair, Terancam Dikembalikan

SOREANG, (PR).-

Dana desa dari pemerintah pusat untuk 280 desa di Kabupaten Bandung sebagian besar belum cair. Jika sampai akhir Juni dana desa belum juga dicairkan, terancam dikembalikan lagi ke pemerintah pusat.

Seorang kepala desa yang enggan disebut namanya mengatakan, sebagian besar desa di Kabupaten Bandung belum bisa mencairkan dana desa dari pusat. "Padahal dana desa sudah ditransfer ke rekening Pemkab Bandung pada bulan-bulan awal tahun 2018. Namun, aturan pencairan seperti peraturan bupati (perbup) baru keluar pada akhir Februari lalu," katanya, di kompleks Pemkab Bandung, Jumat (18/5/2018).

Dia menambahkan, aturan pencairan dana desa cukup rumit sehingga sebagian besar desa belum bisa mencairkannya. "Baik aturan dari pemerintah pusat maupun Pemkab Bandung menghambat pencairan. Saya sendiri belum mencairkan," ucapnya.

Bupati Bandung Dadang M Naser menyatakan, para kepala desa jangan langsung menyalahkan pemerintah termasuk Pemkab Bandung karena kunci pencairan ada di aparat desa. "Untuk mencairkan dana desa ataupun Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) dari Pemkab Bandung harus

memakai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan ADPD 2017," katanya.

Selain itu, aparat desa juga harus membuat proposal pengajuan pencairan ADPD dan dana desa tahun 2018. "Bagaimana bisa cair kalau laporan pertanggungjawaban tahun 2017 dan proposal belum ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung," katanya.

Dadang membantah Pemkab Bandung menghambat upaya pencairan dana desa ataupun ADPD. "Kami tak menghambat sama sekali. Masalahnya di antara desa-desa ingin kompak agar pencairan dana desa dan ADPD bersamaan," ujarnya.

Bahkan, dengan alasan *sabilulungan*, desa-desa menahan pengiriman laporan pertanggungjawaban dan proposal. "Ini *sabilulungan* yang salah. *Sabilulungan* kok kompak menunda persyaratan pencairan. Kalau satu atau dua desa sudah selesai membuat laporan pertanggungjawaban dan proposal, harus langsung diserahkan ke dinas terkait," katanya.

Dadang mengakui bila sampai akhir Juni dana desa belum juga dicairkan, dananya harus kembali ke pemerintah pusat. Seperti juga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa kembali ke pusat bila pencairannya terlambat. **(Sarnapi)*****